

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Takbir Hukum, Edisi Kedua*. Prenadamedia Group, Jakarta. 2009.
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif . Cetakan Kedua*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Baharuddin Lopa & Moh. Yamin. 1987. *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) Berikut Pembahasan Serta Penerapannya Dalam Praktek*. Alumni. Bandung.
- Bambang Poernomo. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana, Terbitan Kelima*. Ghalia. Jakarta.
- Bambang Widjojanto. 2016. *Berkelahi Melawan Korupsi, Tunaikan Janji. Wakafkan Diri*. Intrans Publishing. Malang.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Burhan Asofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta Jakarta.
- Chaerudin, dkk. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama. Bandung.

Chidir Ali. 1979. *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Korupsi*. Bina Cipta. Bandung.

E.PH Sutorius D. Schaffmeister, N.Keijzer. 1995. *Hukum Pidana (Konsorsium Ilmu Hukum)*.

Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Cahaya Atmapustaka. Yogyakarta.

Elwi Danil. 2011. *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Raja Grafindo. Jakarta.

Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung.

Ermansyah Djaja. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika. Jakarta.

Gatot Supramono. 1997. *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. Alumni, Bandung.

Hadari Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Universitas Gajah Mada Press. Yogyakarta.

Hans Kelsen. 2008. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media. Bandung.

Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi & Hukum Pidana*. Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum Prof.Oemar Seno Adji, SH & Rekan. Jakarta.

_____. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Diadit Media. Jakarta.

K. Wantjik Saleh. 1983,. *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap. Cetakan Kelima*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.



- Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Alumni. Jakarta.
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Refika Aditama. Bandung.
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation. New York.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. PT. Alumni. Bandung. 2007.
- Loebby Loqman. 1991. *Beberapa ikhwal di Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. CV Datacom, Jakarta.
- LPPNRI. 2008. *Panduan Kegiatan Sadar Huku Mengenai Korupsi Kulusi Nepotisme Bagi Aparatur Pemerintah, Perguruan Tinggi Dan Masyarakat*. Jakarta.
- M. Umer Chapra. 1995. *Islam dan tantangan ekonomi*. USA: International Institute of Islamic Thought (IIIT) dan The Islamic Foundation.
- Mahathir Mohamad. 1986. *The Challenge*. Pelanduk Publication. Kuala Lumpur.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum. Kencana*. Jakarta.
- Philippus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiat. 2014. *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, *Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Atas Tindak Pemerintahan (makalah)*. dalam Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 25 April s/d 12 Mei 2010. di Bogor.

Pontang Moerad B.M. 2005. *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Alumni. Bandung.

R. Wiyono. 2009. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.

Robin Theobald. 1989. *Corruption, Development and Underdevelopment*. London: *The McMillan Press Ltd*.

Romli Atmasasmita. 2007. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Badan Penelitian Pembinaan Nasional Departemen Hukum Dan HAM. Jakarta.

Shinta Agustina, dkk. 2016. *Penjelasan Hukum : Sifat Melawan Hukum Dalam Kasus Korupsi*. LeIP. Jakarta.

_____. 2014. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Themis Books. Depok.

Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.

Syed Hussein Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. LP3ES. Jakarta.

Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Depok.

Titin Apriani. 2019. *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana*.

Raja Grafindo. Jakarta.

Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 275 K/Pid/1983.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2064 K/Pid/2006.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pid/2006.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974K/Pid/2006.

Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 91/Pid.B/2008/PN. Kpj.

Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1079/Pid.B/2007/PN.Kpj.

JURNAL

Abdul Latif. *Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK*

Atas Pengujian UU PTPK. Jurnal: Jurnal Konstitusi. Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.

Afif Khalid. *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di*

Indonesia. Media Neliti. Volume VI Nomor 11, Januari Juni 2014.

David Jay Green. 2004. *Investment Behavior and The Economic Crisis in*

Indonesia, Journal of Asian Economics. Vol. 15, No. 2, April 2004.

New Brunswick: Rutger University, Elsevier Group.

Fakhrudin Arrozi. *Perbuatan Melawan Hukum Materiil Menurut Hakim*

Pengadilan Negeri Kapanjen. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam. Volume 4, Nomor 1, April 2014.

Indah Sari. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan*

Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Volume 11 No. 1,

September 2020.

Luh Rina Apriani. *Relevansi Fakta Hukum Dalam Penggunaan Sifat Melawan*

Hukum Negatif (Kajian Putusan Nomor 29/Pid.B/2007/PN/PL.R).

Jurnal Yudisial, Vol-Iv/No-01/April/2011.

RB Budi Prastowo. *Delik Formil / Materiil Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor: 003/PUU-IV/2006*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Juli, 2006, Volume 24 No.3.

Rosalina Devi Kusumaningrum. *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*. Jurnal Lex Specialis. Volume 2, No 1. April 2017.

Septri Yustisiani. 2016. *Pemberlakuan Sifat Melawan Hukum Materiil Berfungsi Negatif Dalam Tindak Pidana Korupsi*. E Jurnal : Universitas Kristen Maranatha. [http://Majour.Maranatha.Edu/ Index](http://Majour.Maranatha.Edu/Index). Php/Dialogia-Iuridica/Article/View/1493.

Yanto Yunus, dkk. *Hilangnya Sifat Melawan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Pengembalian Seluruh Kerugian Keuangan Negara*. Jurnal : Media Iuris Vol. 4 No. 2, Juni 2021.

WEBSITE

Kejaksaan Republik Indonesia. Asas-asas Hukum Pidana, [http://www.kejaksaan.go.id/pusdiklat/upling /File/Asas-](http://www.kejaksaan.go.id/pusdiklat/upling/File/Asas-asas%20)

[asas%20](http://www.kejaksaan.go.id/pusdiklat/upling/File/Asas-asas%20) Hukum%20Pidana.doc. diakses 17 Januari 2023. Pukul 14.56 WIB.

Kisah Contra Legem Pasal 244 KUHAP. [https://www.hukumonline.com/berita /a/](https://www.hukumonline.com/berita/a/)

[kisah-icontra-legem-i-pasal-244-kuhap-lt54a1d82fe8974](https://www.hukumonline.com/berita/a/kisah-icontra-legem-i-pasal-244-kuhap-lt54a1d82fe8974). diakses 18

Januari, 2022, Pukul 03.20 Wib.

Majalah Mahkamah Agung RI. https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic-html/page67.html. diakses pada 15 Maret 2023. Pukul 12.32 WIB.

Ninil Eva Yustina,. *Perbuatan Melawan Hukum Materiil (Materiel Wederrechtelijkeheid) Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Praktik Peradilan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi*, diakses dari http://www.pt-jambi.go.id/uploads/others/perbuatan_melawan_hukum_materiil_dalam_tipikor_pada_praktik_peradilan_indonesia.pdf, pada tanggal 17 Januari 2023. Pukul 02.30 WIB.

